



## Analisis Kapasitas Kebijakan Publik dalam Bingkai Modal Sosial: Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Tingkat RT-RW

Jeffri Yosep Simanjorang

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: [jeffriys@unpar.ac.id](mailto:jeffriys@unpar.ac.id)

### Article Info

#### Article History:

Received: 2024-02-02

Revised: 2024-03-07

Accepted: 2024-05-15

#### How to Cite:

Simanjorang, J. P. (2024). Analisis Kapasitas Kebijakan Publik dalam Bingkai Modal Sosial: Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Tingkat RT-RW. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 115-127.

**Abstrak:** Tulisan ini bermaksud mendalami kapasitas kebijakan publik dalam menangani Covid-19 dikaitkan dengan konsep modal sosial. Studi kasus dilakukan dengan tujuan menelaah bagaimana kapasitas kebijakan pembentukan tim dan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat Rumah Tangga (RT) dan tingkat Rumah Warga (RW) dalam usaha menangani kondisi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dikaitkan dengan modal sosial pada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan studi dokumen kebijakan terkait dan wawancara terhadap beberapa informan. Dengan karakteristik wilayah dan penduduk di Kecamatan Bandung Wetan, diharapkan studi kasus pada penulisan ini dapat memberikan potret kebijakan pembentukan tim dan peran Satgas Penanganan Covid-19 di daerah perkotaan di Indonesia dan bagaimana hubungannya dengan keberadaan modal sosial di sebuah masyarakat urban. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut memberi ruang partisipasi warga, yang ketika dipertemukan dengan masyarakat dengan modal sosial yang kuat, memiliki kapasitas yang baik dalam mencapai tujuan kebijakan.

**Kata Kunci:** kapasitas kebijakan; kebijakan publik; modal sosial; Covid-19; satgas Covid-19

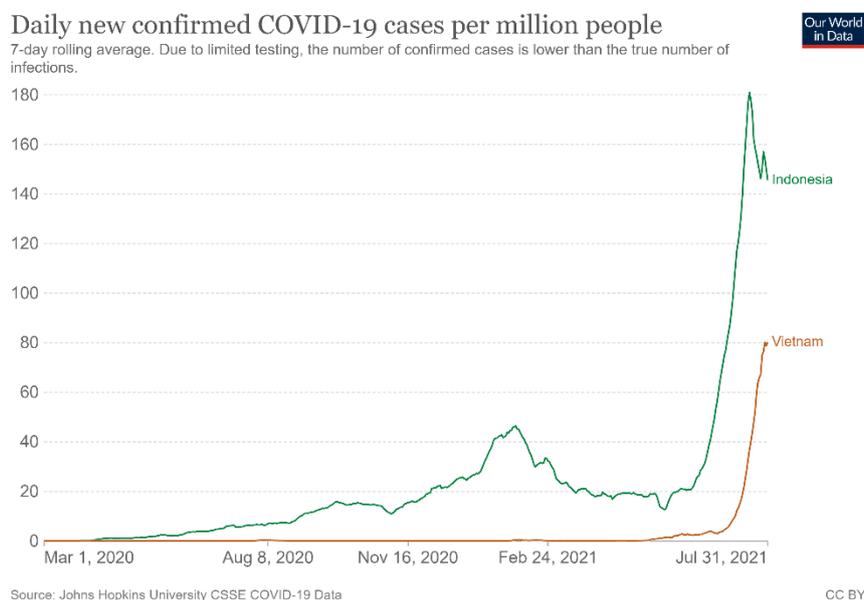
**Abstract:** This article seeks to explore the capacity of policies to address Covid-19 in connection with the concept of social capital. A case study is undertaken to analyze how the policy capacity related to team formation and the role of the Covid-19 Handling Task Force at the Household (RT) and Neighborhood (RW) levels contributes to addressing conditions during the Covid-19 pandemic, intertwined with social capital in the community of the Bandung Wetan Subdistrict in Bandung, Indonesia. The data collection process involved a combination of analysis of relevant policy documents and interviews with multiple informants. Considering the characteristics of the region and population in the Bandung Wetan Subdistrict, it is expected that this case study offers an overview of the policy of team formation and the role of the Covid-19 Handling Task Force in urban areas in Indonesia, illustrating its correlation with the presence of social capital in an urban community. The study concludes that the policy fosters citizen participation, and when combined with a community possessing robust social capital, it enhances the effectiveness of the policy.

**Keywords:** policy capacity; public policy; social capital; Covid-19; Covid-19 task force

## PENDAHULUAN

Sebagai situasi yang bersifat darurat, penyebaran Covid-19 menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya mengenai kebijakan publik para pemangku kepentingan di berbagai belahan dunia yang berupaya melakukan mitigasi Covid-19. Selandia Baru dan Australia, misalnya, dipuji atas tanggapnya otoritas publik dalam melakukan mitigasi penyebaran virus. Meskipun kedua negara tersebut menggunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda ([Bromfield & McConnell, 2021](#)), efektivitas pemerintah kedua negara tersebut mendapat apresiasi masing-masing warga tiap negara, ditandai dengan meningkatnya tingkat kepercayaan terhadap otoritas kedua negara ([Goldfinch et al., 2021](#)).

Di Asia Tenggara, Vietnam dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu membatasi laju penyebaran virus dengan beberapa perangkat kebijakan seperti yang dikemukakan oleh [Ha et al., \(2020\)](#) juga [Van Nguyen et al., \(2021\)](#) yang menjelaskan kesuksesan negara tersebut dalam mencegah dan melakukan kontrol atas Covid-19 melalui kepemimpinan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan negara juga dengan mobilisasi para pemangku kepentingan lintas sektoral. Meskipun secara geografis Vietnam berdekatan dengan Tiongkok, Vietnam mampu menekan risiko merebaknya Covid-19, setidaknya sampai bulan Juli tahun 2021. Ketika dibandingkan dengan upaya yang dilakukan Indonesia, [Salsabila & Dhamanti \(2021\)](#) menerangkan bahwa pada fase awal penyebaran Covid-19, Vietnam telah menyiapkan berbagai regulasi yang efektif dalam mengantisipasi risiko dengan cakupan yang luas. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, di mana kebijakan yang diberikan masih sangat terbatas, terbukti dengan laju penularan Covid-19 yang terus meningkat sampai Januari 2021 dan meningkat tajam pada Juli 2021 (lihat Gambar 1).



**Gambar 1. Perbandingan antara Vietnam dan Indonesia Pada Fase Awal Masa Pandemi Covid-19**

*Sumber: [Our World in Data, 2022](#)*

Dengan pola penyebaran Covid-19 yang dapat menular dengan sangat cepat dan memaksa seseorang untuk melakukan karantina ketika terpapar, interaksi manusia secara fisik perlu dibatasi. Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19. Pada satu sisi, masyarakat membutuhkan bantuan ketika terpapar

Covid-19, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, mobilisasi manusia tidak dapat bergerak secara leluasa sebagaimana mestinya, di mana terdapat pembatasan berbagai aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga memaksa mekanisme pemberian bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu disesuaikan dan membutuhkan terobosan di dalam penerapan upaya-upaya penanganan masalah Covid-19 ([Aminullah & Erman, 2021](#); [Liu et al., 2022](#)), termasuk di Indonesia.

### **Kapasitas Kebijakan Publik Awal Masa Pandemi di Indonesia**

Kapasitas kebijakan dapat dipahami sebagai seperangkat keterampilan, kompetensi, dan sumber daya di berbagai lembaga pemerintah untuk merancang dan mencapai tujuan kebijakan ([Howlett, 2015](#)). Terdapat dua dimensi pada tulisan tersebut, yaitu (1) dimensi keterampilan yang mencakup kompetensi analitis, kompetensi manajerial, dan kompetensi politik; dan (2) dimensi sumber daya yang mencakup kapasitas individu, kapasitas organisasional, dan kapasitas sistem ([Howlett, 2015](#)).

Dalam memahami bagaimana strategi yang dapat diterapkan berbagai negara untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 dan mengelola aspek kehidupan lainnya selama masa pandemi, kapasitas kebijakan menjadi tren penulisan mengenai kebijakan publik. Di benua Asia, tulisan [Mardiyanta & Wijaya \(2023\)](#) menjelaskan bahwa kapasitas kebijakan sangat memengaruhi penanganan Covid-19 dengan memberikan catatan terhadap (1) kepercayaan dan legitimasi politik, (2) komunikasi politik, (3) kepemimpinan politik, dan (4) *co-production*, kerja sama dan kapasitas komunitas.

Terkait poin terakhir di atas, *collaborative governance* dan *multilevel governance* ([Adeel et al., 2020](#)) menggunakan istilah subnasional menjadi 2 konsep yang banyak dibahas para peneliti. [Ansell & Gash \(2008\)](#) memaknai *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola yang melibatkan partisipasi langsung dari lembaga publik dan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif, bertujuan untuk menghasilkan kebijakan publik atau mengelola program atau sumber daya publik, seringkali ditandai dengan upaya mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan deliberasi. Sedangkan dalam konsep *multilevel governance*, negara dianggap tidak perlu lagi menjadi aktor sentral dalam pembuatan kebijakan. Sebaliknya, kekuatan pemerintah dibentuk dan dibagi kepada berbagai aktor dalam berbagai level ([Saito-Jensen, 2015](#)).

Kedua konsep tersebut menjadi semakin relevan pada saat pandemi Covid-19 menjadi "musuh bersama" yang memaksa negara untuk berkolaborasi dengan negara lain. Selain itu, kebijakan yang bersifat *multilevel* pun dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang sangat kompleks ([Benz, 2021](#); [Gaskell & Stoker, 2020](#)) seperti wabah Covid-19, mulai dari skala lokal, nasional, regional, hingga global ([Saito-Jensen, 2015](#)).

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia gagap dalam menangani pandemi Covid-19, setidaknya pada fase awal penyebaran virus tersebut pada Januari hingga Maret 2020 ([Djalante et al., 2020](#); [Subroto et al., 2021](#); [Chairil, 2020](#); [Hosen & Hammado, 2021](#)). Selain beredarnya pernyataan-pernyataan yang mengacuhkan ancaman Covid-19 dan berbagai narasi yang tidak menunjukkan kepekaan terhadap ancaman bencana ([Agustino, 2020](#)), pengambilan keputusan yang bersifat lintas sektoral pun masih sangat terbatas. Bahkan, penelitian [Ayuningtyas et al., \(2021\)](#) menyimpulkan adanya indikasi konflik kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik dalam penanganan Covid-19 yang menyebabkan beberapa kekacauan dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui beberapa tulisan yang memandang situasi yang sangat kompleks ketika awal penyebaran Covid-19 yang menyebabkan banyak aktivitas terhambat karena ancaman virus tersebut. [Angeli & Montefusco \(2020\)](#) dengan sangat baik menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan publik terkait Covid-19 merupakan

intervensi kompleks pada sistem sosial yang juga kompleks. Lebih lanjut, [Angeli & Montefusco \(2020\)](#) juga berpendapat bahwa formulasi kebijakan publik sangat bergantung pada kondisi sistem sebuah negara sebelum adanya Covid-19.

Sejak kemunculan Covid-19 pada Desember 2019 di Tiongkok, Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, terdapat 2 warga negara Indonesia yang terpapar Covid-19. Dari tanggal tersebut, Pemerintah menetapkan status kedaruratan melalui Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020. Pada tanggal yang sama, Presiden juga menetapkan peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Kebijakan PSBB pun tidak luput dari perhatian berbagai pihak. Beberapa peneliti percaya bahwa dibandingkan penetapan karantina (*lockdown*), penetapan PSBB sudah tepat di mana pekerja di sektor informal dapat tetap melakukan usaha harian mereka ([Andriani, 2020](#)). Meskipun begitu, penelitian yang sama mempertanyakan kampanye “adaptasi kebiasaan baru” yang digalakkan pemerintah. Kampanye tersebut dinilai prematur, di mana seharusnya kampanye tersebut diyakini lebih tepat diberlakukan pada sebuah daerah yang berhasil mengalami penurunan angka positif Covid-19.

Lebih lanjut, artikel [Sulasih \(2020\)](#) menilai bahwa PSBB tidaklah efektif, dengan melihat bahwa kesadaran masyarakat akan PSBB sangatlah minim. Perilaku tidak patuh terhadap kebijakan terkait pengendalian ancaman Covid-19 seperti PSBB sebetulnya telah dijelaskan oleh penelitian [Rosha et al., \(2021\)](#) yang menyimpulkan bahwa di Jakarta lebih dari 20% responden tidak mematuhi PSBB dengan berbagai faktor, seperti umur, *gender*, pekerjaan, opini terhadap PSBB, dan modal sosial. Faktor terakhir akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Selain rangkaian kebijakan-kebijakan dan dinamika di masyarakat selama fase awal Covid-19, sebetulnya terdapat kebijakan yang masih cukup jarang dibahas oleh para peneliti, yaitu pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 dengan melibatkan elemen masyarakat sampai tingkat RT dan RW. Pembentukan tersebut dapat dilihat sebagai model baru dalam penanganan masalah, dengan melibatkan partisipasi publik di tingkat akar rumput sehingga memungkinkan koordinasi antara warga dan pemerintah daerah menjadi lebih efisien dan efektif ([Pantić et al., 2021](#); [Corpuz, 2021](#); [Khongsai et al., 2021](#)).

### **Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Tingkat RT-RW**

Setelah terbitnya beberapa produk kebijakan dalam bentuk regulasi terkait penanganan Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut diberikan tugas untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat; melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Dengan melibatkan banyak menteri dari berbagai kementerian dan tokoh-tokoh penting lainnya, Komite Penanganan Covid-19 berfokus kepada penanganan secara nasional. Hal tersebut dilanjutkan dengan beberapa produk regulasi yang diterbitkan

kemudian, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengatur setiap kepala daerah untuk membentuk gugus tugas dalam hal percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Peraturan tersebut lebih lanjut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, dengan melibatkan RT-RW dan unsur kemasyarakatan lainnya untuk berkoordinasi dalam upaya penanganan Covid-19.

Kebijakan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara mengeluarkan kebijakan untuk membentuk lembaga atau badan ad hoc yang diharapkan mampu menangani kondisi pandemi dengan spesifik. Karakteristik Covid-19 yang mengancam banyak aspek kehidupan membuat kebijakan tersebut menjadi kebijakan strategis dalam upaya menekan laju penyebaran virus dan menopang berbagai dimensi yang terdampak Covid-19. [Adeel et al., \(2020\)](#) mencatat pentingnya memberikan ruang pengelolaan pada entitas yang lebih kecil dari nasional, sehingga memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kondisi di masyarakat.

### **Modal Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19**

Sebagai konsep yang dipahami sebagai keseluruhan sumber daya yang bersumber dari kepemilikan sebuah jaringan, modal sosial terus diperbincangkan dalam berbagai isu pembangunan. Modal sosial seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berdampak positif terhadap kehidupan komunitas. Semakin tinggi modal sosial, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan atau dampak positif dalam berbagai *setting*, seperti meningkatkan efisiensi dalam dunia ekonomi dan stabilitas demokrasi ([Fukuyama, 2000](#)), produktivitas dalam dunia kerja ([Greve et al., 2010](#)), inovasi dalam dunia usaha ([Xie et al., 2021](#)).

Dalam konteks pandemi Covid-19, modal sosial juga berpotensi menjadi bagian dari pemecahan masalah. Pandangan ini disampaikan oleh [Fukuyama \(2000\)](#) yang melihat modal sosial sebagai kemampuan bekerja sama dengan mengacu pada norma dan nilai-nilai informal yang berlaku di komunitas. Ketika dihubungkan dengan munculnya berbagai inisiatif yang ada di masyarakat ([Sitohang et al., 2020](#)), pandangan [Fukuyama \(2000\)](#) tersebut dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi.

Penelitian mengenai kontribusi modal sosial terhadap sistem proteksi sosial atau solidaritas sosial sebetulnya sudah cukup banyak. [Funay \(2020\)](#) misalnya, menggambarkan nilai (dalam konteks modal sosial dapat dipahami sebagai norma) budaya lokal dapat menjadi dasar dalam sistem solidaritas di tengah masyarakat saat pandemi berlangsung. Selanjutnya, [Pitas & Ehmer \(2020\)](#) berpendapat bahwa modal sosial mampu menyediakan berbagai keuntungan selama kondisi krisis, dengan menggambarkan semakin tinggi modal sosial, maka ketangguhan masyarakat pun akan lebih baik.

Lebih lanjut, pemetaan tiga dimensi di dalam modal sosial yang dijelaskan oleh [De Jong \(2010\)](#) menerangkan bahwa di dalam konsep modal sosial terdapat elemen-elemen yang mencakup aspek struktural seperti ikatan, penghubung, dan koneksi antar kelompok; aspek relasional seperti kepercayaan, norma, kewajiban, dan identitas; serta aspek kognitif seperti kode-kode bersama dan cerita bersama.

Meskipun begitu, terdapat pandangan yang melihat modal sosial tidak sepenuhnya dapat membantu upaya penanganan Covid-19. Artikel [Bai et al., \(2020\)](#) misalnya, mengutarakan bahwa dalam kebijakan pembatasan sosial di Amerika Serikat, norma yang berlaku di masyarakat berkontribusi secara positif di mana terjadi kesepakatan secara

tidak langsung untuk mengurangi pertemuan secara fisik. Akan tetapi, ketika *networking* sebuah komunitas sangat kuat, maka seseorang akan sulit untuk mempraktikkan pembatasan sosial. Dengan begitu, modal sosial perlu dikelola dengan baik agar dapat membantu usaha penanganan Covid-19. Pandangan tersebut diperkuat oleh [Alfano & Ercolano, \(2021\)](#) yang memandang selain modal sosial, kualitas lembaga yang memiliki otoritas juga berperan penting untuk menunjang efikasi sebuah kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan perpaduan antara studi literatur berbagai karya ilmiah terkait kebijakan publik dan modal sosial dalam penanganan Covid-19, studi dokumentasi atas pembentukan tim Satgas Covid-19 di Kecamatan Bandung Wetan, dan wawancara mendalam terhadap 6 orang yang terdiri dari Aparatur Kecamatan, Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan, Anggota Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat RT-RW, Ketua RW, dan warga Kecamatan Bandung Wetan. Wawancara dilakukan pada bulan Mei 2022. Triangulasi dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap artikel-artikel sebelumnya dan pemberitaan yang tersedia di berbagai media.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kapasitas kebijakan dalam menghadapi kondisi turbulensi seperti masa pandemi Covid-19 sangatlah penting. Artikel [Howlett \(2015\)](#) dan [Mukherjee et al., \(2021\)](#) mengungkap pentingnya memahami 3 dimensi di dalam kapasitas kebijakan, mulai dari individu, organisasi, dan sistem. Studi [Mardiyanta & Wijaya \(2023\)](#) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen dalam aspek kapasitas operasional yang memengaruhi aspek keberhasilan kebijakan dalam menangani Covid-19, yaitu kesiapan dan responsivitas pemerintah, transparansi informasi, kebijakan kesehatan masyarakat, dan efektivitas intervensi non-farmasi. Dari beberapa penjelasan tersebut, kebijakan publik Pemerintah Indonesia terkait Covid-19 pada awal masa pandemi sulit untuk dikatakan baik, mengingat banyaknya kekurangan di berbagai lini ([Subroto et al., 2021](#); [Sparrow et al., 2020](#)).

Dalam situasi bencana wabah penyakit seperti Covid-19, kemampuan pembuat kebijakan setiap negara untuk bertindak cepat dan beradaptasi dengan setiap perubahan sangatlah penting ([Janssen & van der Voort, 2020](#)). Opini [Janssen & van der Voort \(2020\)](#) tersebut juga meyakini bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan membutuhkan kompetensi dalam pengambilan keputusan sentralisasi dan desentralisasi. Pendapat tersebut relevan dengan dinamika masa awal pandemi di Indonesia, di mana usaha Pemerintah Pusat sempat mengalami berbagai kesulitan dalam penerapannya di masyarakat ([Agustino, 2020](#)) dan akhirnya menuangkan kebijakan untuk melibatkan banyak aktor di level akar rumput untuk memerangi Covid-19.

Setelah penerbitan beberapa kebijakan pada level nasional dan provinsi terkait pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 pada tingkat RT dan RW, Kecamatan Bandung Wetan pun menindaklanjuti dengan pembentukan Satgas di tiap kelurahan. Dengan terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Cihapit, Kelurahan Tamansari, dan Kelurahan Citarum, setiap Lurah menetapkan keputusan yang berisi Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kelurahan masing-masing pada tanggal 1 April 2020 (Cihapit), 3 April 2020 (Tamansari), dan 15 Februari 2021 (Citarum).

Setiap daerah pasti memiliki modal sosial. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana modal sosial tersebut dikelola, seberapa kuat modal sosial tersebut, dan seberapa mudah modal sosial tersebut dapat diakses oleh setiap anggota komunitas. Hal ini terjadi pula di Kecamatan Bandung Wetan. Sebelum adanya Satgas Covid-19 di tingkat

RT-RW, masyarakat memiliki solidaritas yang cukup tinggi. Pandangan tersebut disampaikan oleh I, Koordinator Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan yang menyampaikan:

*"Sebenarnya, sebelum ada Satgas Covid-19 (di tingkat RT-RW), solidaritas masyarakat itu ada. Misalnya kalo ada yang kena (Covid-19), kita ngasihin makanan. Cuma, setelah adanya Tim Satgas Covid-19 di Tingkat RT-RW, kita bantu distribusinya. Jadi makanan itu dikumpulin ke kita, terus kita bagiin ke warga yang lagi positif. Terus kan kita bisa bantu steril-in makanannya."*

Ucapan tersebut menggambarkan bagaimana norma dalam konsep modal sosial di Kecamatan Bandung Wetan telah berkontribusi dalam upaya penanganan Covid-19. Selain itu, kehadiran Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW memanfaatkan modal sosial yang ada dan mengembangkannya dalam distribusi bantuan kepada warga yang terpapar Covid-19. Terkait *trust* dan *trustworthiness*, R (warga Kelurahan Tamansari) mengemukakan pendapatnya mengenai keterbukaan warga:

*"...itu juga perlu keterbukaan dari masyarakat. Satgas bisa langsung turun tangan ke lokasi (apabila ada yang terpapar Covid-19). Kalo nggak, mereka tau dari mana."*

Selain berperan dalam pendistribusian bantuan, Tim Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW juga berperan dalam mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga diri untuk terhindar dari ancaman terpapar Covid-19. I menjelaskan:

*"... kita ngingetin masyarakat juga biar gak nganggep enteng (terhadap Covid-19)."*

Pendapat I diperkuat oleh pengakuan A, salah satu Ketua RW di Kelurahan Tamansari yang menceritakan peran Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat RT-RW dalam menghilangkan stigma di masyarakat kepada keluarga yang terpapar Covid-19:

*"Sempet ada keluarga yang dikucilkan karena ada anggota keluarga yang positif (Covid-19). Satgas mengedukasi kalau orang yang positif itu memang perlu melakukan isolasi mandiri, tapi gak perlu khawatir berlebihan dan mengucilkan mereka."*

G, anggota Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat RT-RW di RW 05 Kelurahan Cihapit, bercerita tentang perubahan perilaku di masyarakat sebelum dan sesudah kehadiran Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW:

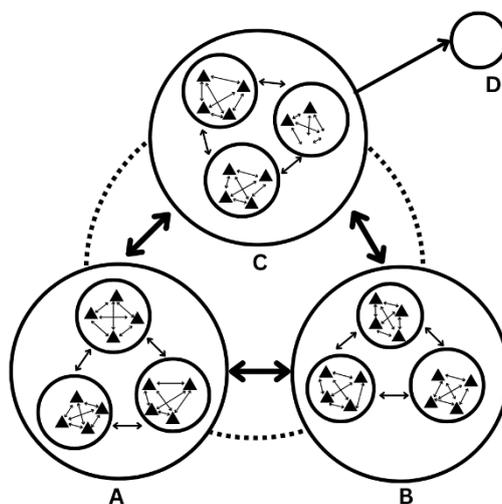
*"..... awalnya mah haré-haré (acuh tidak acuh), kitu. Tapi, begitu dihimbau, mereka ngerti. Mereka jadi memperhatikan protokol kesehatan di sini dan menjauhi kerumunan. Biasanya ada banyak orang (kerumunan) pagi-pagi di pasar, sekarang mah udah jaga jarak."*

Dalam menjalankan peran sebagai Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW, I menjelaskan bahwa mereka berjejaring dengan masyarakat sekitar dan Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW daerah lainnya di Kota Bandung. Inisiatif tersebut sangatlah baik, di mana pemantauan akan laju penyebaran Covid-19 akan lebih mudah diantisipasi dan intervensi yang perlu diberikan pun dapat lebih cepat tersebar ke daerah-daerah lainnya. Ungkap I:

*"Kita ada grup jejaring sama Pekerja Sosial Masyarakat Kota Bandung, karena kita kan sama-sama bantu (penanganan Covid-19) juga. Jadi kalau di daerah mana ada apa, kita tau."*

Selain itu, di level kecamatan, Z menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW berjalan dengan baik. Walaupun peran yang diberikan pada Z lebih kepada pemantauan, Z mengaku beberapa kali mendatangi masyarakat ketika dibutuhkan. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa ketika kelurahan membutuhkan bantuan, kecamatan akan membantu mencari solusi. Selain kepada instansi-instansi di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Z mengakui membina *networking* dengan pihak luar, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Bandung yang sempat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di beberapa daerah di Kecamatan Bandung Wetan. Berbagai pendapat

Satgas Covid-19 Tingkat RT-RW di atas menggambarkan bahwa pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat RT-RW memberikan ruang partisipasi masyarakat di Bandung Wetan. Ruang tersebut dapat dipergunakan oleh warga untuk lebih responsif dalam menanganai Covid-19. Hal ini mencerminkan penerapan *participatory governance* yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam implementasi kebijakan publik (Fischer, 2012). *Participatory governance* memungkinkan sebuah perencanaan dan eksekusi sebuah kebijakan di level masyarakat, dan akhirnya dapat menjadi solusi efektif terhadap isu-isu tertentu (Fung & Wright, 2001). Temuan ini juga selaras dengan pandangan (Jongkon, 2016) bahwa *participatory governance* yang terlembagakan lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan sebuah kebijakan. Dengan demikian, pandangan Howlett (2015) mengenai kapasitas individu, kapasitas organisasional, dan kapasitas sistem dapat dikategorikan terpenuhi dalam penelitian ini.



**Gambar 2. Ilustrasi Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat RT-RW dihubungkan dengan modal sosial di Kecamatan Bandung Wetan**

Gambar 2 mengilustrasikan temuan bahwa pembentukan Satgas Covid-19 tingkat RT-RW di Kecamatan Bandung Wetan (lingkaran dengan garis putus) terdiri dari 3 kelurahan yaitu A, B, C. Di tingkat kelurahan, terdapat beberapa Satgas di tingkat RW, demikian pula pada tingkat RW yang memiliki beberapa Satgas tingkat RT. Dengan pola kerja yang dilakukan, pembentukan Satgas mampu berperan secara efektif dalam memantau laju virus dan penerapan adaptasi kebiasaan baru yang banyak digalakkan saat masa pandemi Covid-19. Usaha pemenuhan kebutuhan dasar pada saat seseorang terpapar Covid-19 pun terbantu dengan pola *reciprocity* dan *networking* yang ada di masyarakat. Selain itu, dengan pola yang ada, bantuan dari pihak eksternal (D) memungkinkan untuk diakses oleh A, B, C.

Pembentukan Satgas juga dapat dilihat sebagai bentuk implementasi *multilevel governance* dan *collaborative governance* yang banyak diterapkan oleh banyak negara. Kondisi tersebut menjadi sangat wajar karena dengan melibatkan banyak aktor pada berbagai level masyarakat, intervensi pemerintah dapat lebih terarah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan aktual warga di tingkat paling kecil. Selain itu, kebijakan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 juga dapat mengakomodasi nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, Satgas Penanganan Covid-19 dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam mengelola risiko yang ditimbulkan oleh Covid-19.

Mengacu pendapat [Howlett \(2015\)](#) dan [Mukherjee et al. \(2021\)](#), penelitian ini menemukan bahwa kapasitas kebijakan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat RT-RW berhasil memenuhi kriteria berbagai level kapasitas:

- a. Kapasitas analitis yang mencakup pemahaman akan substansi kebijakan (dalam hal ini Satgas Penanganan Covid-19 tingkat RT-RW) dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menangani Covid-19 dengan perkembangan situasi yang ada, kemampuan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi berdasarkan kebutuhan juga pemanfaatan sumberdaya;
- b. Kapasitas operasional yang mencakup kreatifitas dan ketangguhan dalam menyikapi perkembangan Covid-19, kemampuan untuk menjalin kolaborasi dengan pihak lain baik secara internal organisasi maupun eksternal, dan pemahaman mekanisme koordinasi dan kolaborasi lintas pihak; dan
- c. Kapasitas politis yang mencakup pengelolaan kolaborasi lintas pihak, *multilevel governance*, kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pembentukan tim Satgas Penanganan Covid-19 pada skala RT-RW berperan krusial dalam upaya menekan dan pengawasan laju virus di tingkat akar rumput. Keterlibatan partisipasi publik di level RT dan RW berperan secara signifikan ketika dikombinasikan dengan modal sosial. Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 mampu menjadi wadah yang mengembangkan modal sosial yang ada, terutama dalam hal *trust*, *reciprocity*, dan *networking*. Kebijakan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 pada skala kecil dapat diinterpretasikan sebagai wujud usaha pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dan usaha pengelolaan masa pandemi. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang diterapkan dalam wujud partisipasi lintas sektor dan konsep *multilevel governance* yang diterapkan melalui pembagian peran dan otoritas negara melalui Satgas Penanganan Covid-19 tingkat RT-RW. Dalam hal pencegahan penyebaran virus, *trust* dapat terlihat dari interaksi Satgas dengan warga dalam pembatasan aktivitas di luar rumah dan keterbukaan warga saat ada keluarga yang terpapar Covid-19. Terkait *reciprocity*, saat warga terpapar virus, warga lain membantu dengan memberikan suplai makanan pokok dan obat-obatan. Kondisi tersebut berjalan secara dua arah, sehingga terdapat 2 peran di dalam warga, yaitu pemberi bantuan dan penerima bantuan. Selanjutnya, dengan adanya Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat RT-RW, *networking* sangat terbantu dalam aktivitas pendistribusian bahan makanan pokok dan obat-obatan, dan meningkatkan aksesibilitas pemenuhan kebutuhan warga baik dalam sirkulasi informasi terkait virus, adaptasi kebiasaan baru, hingga penanganan kondisi Covid-19 yang membutuhkan peran pemerintah daerah.

Respon kebijakan yang melibatkan konsep modal sosial masyarakat dapat menjadi solusi dalam penanganan masa pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [\(Wong & Kohler, 2020\)](#) yang menekankan kebutuhan untuk melibatkan partisipasi masyarakat ketika terdapat keterbatasan kebijakan yang bersifat *top-down*. Dengan begitu, modal sosial dapat dikembangkan melalui keberadaan Satgas Penanganan Covid-19 di masyarakat dan menghasilkan resiliensi warga dalam menjalankan masa pandemi. Dengan batasan *scope* wilayah pada studi kasus ini, penelitian-penelitian lanjutan sangat diharapkan dengan skala yang lebih besar agar peran Satgas Penanganan Covid-19 dapat dipahami secara holistik dengan lokasi penelitian yang lebih luas agar keberagaman karakter daerah dan demografi di dalamnya dapat terhimpun dengan lebih baik. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisis kebijakan serupa yang dihadapkan dengan masyarakat dengan modal sosial yang tidak begitu baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeel, A. B., Catalano, M., Catalano, O., Gibson, G., Muftuoglu, E., Riggs, T., Sezgin, M. H., Shvetsova, O., Tahir, N., Vandusky-Allen, J., Zhao, T., & Zhirnov, A. (2020). COVID-19 policy response and the rise of the sub-national governments. *Canadian Public Policy*, 46(4), 565–584. <https://doi.org/10.3138/cpp.2020-101>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Alfano, V., & Ercolano, S. (2021). Social capital, quality of institutions and lockdown. Evidence from Italian provinces. *Structural Change and Economic Dynamics*, 59, 31–41. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.08.001>
- Aminullah, E., & Erman, E. (2021). Policy innovation and emergence of innovative health technology: The system dynamics modelling of early COVID-19 handling in Indonesia. *Technology in Society*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101682>
- Andriani, H. (2020). Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) toward the New Normal Era during COVID-19 Outbreak: A Mini Policy Review. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/ihpa.v5i2.4001>
- Angeli, F., & Montefusco, A. (2020). Sensemaking and learning during the Covid-19 pandemic: A complex adaptive systems perspective on policy decision-making. *World Development*, 136, 105106. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105106>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ayuningtyas, D., Haq, H. U., Utami, R. R. M., & Susilia, S. (2021). Questioning the Indonesia Government's Public Policy Response to the COVID-19 Pandemic: Black Box Analysis for the Period of January–July 2020. *Frontiers in Public Health*, 9(May), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.612994>
- Bai, J. (Jianqiu), Jin, W., & Wan, C. (2020). The Impact of Social Capital on Individual Responses to COVID-19 Pandemic: Evidence from Social Distancing. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3609001>
- Benz, A. (2021). Introduction: What is multilevel governance? *A Research Agenda for Multilevel Governance*, 1–15. <https://doi.org/10.4337/9781789908374.00006>
- Bromfield, N., & McConnell, A. (2021). Two routes to precarious success: Australia, New Zealand, COVID-19 and the politics of crisis governance. *International Review of Administrative Sciences*, 87(3), 518–535. <https://doi.org/10.1177/0020852320972465>
- Chairil, T. (2020). Indonesian government's COVID-19 measures, january-may 2020: Late response and public health securitization. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(2), 128–152. <https://doi.org/10.22146/jsp.55863>
- Coronavirus Disease (COVID-19). (15 Mei 2022). Retrieved from [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)
- Corpuz, J. C. G. (2021). Building vaccine confidence through public participation. *Journal of Public Health*. 44(2), e275–e276. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab171>
- De Jong, T. (2010). *Linking Social Capital to Knowledge Productivity: An exploratory study on the relationship between social capital and learning in knowledge-productive networks*. 259. <https://doi.org/10.1007/978-90-313-8210-1>

- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Fischer, F. (2012). *Participatory Governance: From Theory To Practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0032>
- Fukuyama, F. (2000). Social Capital and Civil Society. *IMF Working Papers*, 00(74), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451849585.001>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41. <https://doi.org/10.1177/0032329201029001002>
- Gaskell, J., & Stoker, G. (2020). Centralized or decentralized which governance systems are having a “good” pandemic? *Democratic Theory*, 7(2), 33–40. <https://doi.org/10.3167/dt.2020.070205>
- Goldfinch, S., Taplin, R., & Gauld, R. (2021). Trust in government increased during the Covid-19 pandemic in Australia and New Zealand. *Australian Journal of Public Administration*, 80(1), 3–11. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12459>
- Greve, A., Benassi, M., & Sti, A. D. (2010). Exploring the contributions of human and social capital to productivity. *International Review of Sociology*, 20(1), 35–58. <https://doi.org/10.1080/03906701003643261>
- Ha, B. T. T., Quang, L. N., Mirzoev, T., Tai, N. T., Thai, P. Q., & Dinh, P. C. (2020). Combating the COVID-19 epidemic: Experiences from Vietnam. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph17093125>
- Hosen, N., & Hammado, N. (2021). Indonesia’s Response to the Pandemic. In *Covid-19 in Asia* (pp. 307–320). <https://doi.org/10.1093/oso/9780197553831.003.0021>
- Howlett, M. (2015). Policy analytical capacity: The supply and demand for policy analysis in government. *Policy and Society*, 34(3–4), 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.002>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Jongkon, L. (2016). Designed to Succeed: Participatory Governance, Transaction Cost, and Policy Performance. *The Korean Journal of Policy Studies*, 31(2), 1–22. <https://doi.org/10.52372/kjps31201>
- Keputusan Camat Bandung Wetan Nomor TU.01.02/032 - Kec. Bawet/XII/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Kecamatan Bandung Wetan.
- Keputusan Lurah Cihapit Nomor 016/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
- Keputusan Lurah Citarum Nomor 006/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

- Keputusan Lurah Tamansari Nomor 013/Lurah Tamansari/IV/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
- Khongsai, L., Anal, T. S. S. C., A.S, R., Kh, T. S., Shah, M. K., & Pandey, D. (2021). Combating the Spread of COVID-19 Through Community Participation. *Global Social Welfare*, 8(2), 127–132. <https://doi.org/10.1007/s40609-020-00174-4>
- Liu, Z., Shi, Y., & Yang, B. (2022). Open Innovation in Times of Crisis: An Overview of the Healthcare Sector in Response to the COVID-19 Pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1). <https://doi.org/10.3390/joitmc8010021>
- Mardiyanta, A., & Wijaya, C. N. (2023). Policy capacity during COVID-19 in Asia: A systematic literature review. *Journal of Public Affairs*, 23(1), e2835. <https://doi.org/10.1002/pa.2835>
- Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy capacities and effective policy design: A review. *Policy Sciences*, 54(2), 243–268. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8>
- N. Funay, Y. E. (2020). Indonesia dalam Pusaran Masa Pandemi: Strategi Solidaritas Sosial berbasis Nilai Budaya Lokal. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 107–<https://doi.org/10.22373/jsai.v1i2.509>
- Our World in Data <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~IDN&Metric=Confirmed+cases> diakses pada 19 Mei 2022
- Pantić, M., Cilliers, J., Cimadomo, G., Montaña, F., Olufemi, O., Mallma, S. T., & van den Berg, J. (2021). Challenges and opportunities for public participation in urban and regional planning during the COVID-19 pandemic—Lessons learned for the future. *Land*, 10(12), 1379. <https://doi.org/10.3390/land10121379>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Pitas, N., & Ehmer, C. (2020). Social Capital in the Response to COVID-19. *American Journal of Health Promotion*, 34(8), 942–944. <https://doi.org/10.1177/0890117120924531>
- Rosha, B. C., Suryaputri, I. Y., Irawan, I. R., Arfines, P. P., & Triwinarto, A. (2021). Factors affecting public non-compliance with large-scale social restrictions to control COVID-19 transmission in Greater Jakarta, Indonesia. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 54(4), 221–229. <https://doi.org/10.3961/jpmph.21.101>
- Saito-Jensen, M. (2015). *Multilevel Governance Theory. Theories and Methods for the Study of Multilevel Environmental Governance*, May 2018, 1–6.

- Salsabila, S., & Dhamanti, I. (2021). Governmental Policies in Managing COVID-19 Pandemic: Comparative Study Between Indonesia and Vietnam, Period of January – March 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.26553/jikm.2021.12.1.1-11>
- Subroto, S., Dwijayanti, A. I. P., & Yohanes, R. (2021). Indonesia Government's Responses to COVID-19: A Critical Review to Pre-Crisis and Crisis Phase. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 117–132. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.6665>
- Sitohang, M. Y., Rahadian, A. S., & Prasetyoputra, P. (2020). Indonesian Community Initiative in the Early Phase of the Covid-19 Pandemic: A Health Development Strategy. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902 (Edisi Khusus Demografi dan COVID-19), 33–38. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.581>
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Sulasih, R. E. S. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Binamulia Hukum*, 9(1), 67–82. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>
- Van Nguyen, Q., Cao, D. A., & Nghiem, S. H. (2021). Spread of COVID-19 and policy responses in Vietnam: An overview. *International Journal of Infectious Diseases*, 103, 157–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.11.154>
- Wong, A. S. Y., & Kohler, J. C. (2020). Social capital and public health: Responding to the COVID-19 pandemic. *Globalization and Health*, 16(1), 1–4. <https://doi.org/10.1186/s12992-020-00615-x>
- Xie, G. H., Wang, L. P., & Lee, B. F. (2021). Understanding the Impact of Social Capital on Entrepreneurship Performance: The Moderation Effects of Opportunity Recognition and Operational Competency. *Frontiers in Psychology*, 12, 687205. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.687205>